MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib arsip serta mempermudah penataan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan penemuan kembali arsip, perlu mengatur klasifikasi arsip Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

b. bahwa untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu menyusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selaku pimpinan pencipta arsip perlu menetapkan klasifikasi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan fungsi:
a. fasilitatif; dan
b. substantif.

KEDUA : Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti Pedoman Penerapan Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti Pedoman Penerapan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KELIMA : Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Penerapan akses arsip selain di luar pengguna yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini harus berdasarkan persetujuan Pencipta Arsip atau Pejabat yang berwenang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

PEDOMAN PENERAPAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

I. PENDAHULUAN

Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip untuk mendukung akses, dan pemanfaatan arsip serta penyusutan arsip. Klasifikasi arsip disusun berdasarkan analisis fungsi dan tugas pencipta arsip yang disusun secara logis, sistematis, dan kronologis. Klasifikasi arsip dibedakan menjadi fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Fungsi fasilitatif menggambarkan tugas-tugas yang mendukung kegiatan pokok sedangkan fungsi substantif menggambarkan kegiatan pokok Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi huruf dan angka. Tujuan penggunaan kode klasifikasi arsip ini adalah agar arsip yang masalahnya sama akan terkumpul/terkelompok dalam satu berkas sehingga penyimpanannya dapat dilakukan secara logis dan sistematis yang pada akhirnya akan memudahkan penemuan kembali.

Kode klasifikasi arsip disusun sebagai sarana penataan arsip mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali, sampai dengan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dengan kode klasifikasi arsip diharapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan pemberian kode klasifikasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terkandung dalam arsip secara tepat dan benar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

II. SISTEMATIKA KODE KLASIFIKASI ARSIP

Kode klasifikasi arsip diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode.

A. Sistem Klasifikasi

Klasifikasi arsip dengan sistem ini (struktur kegiatan dan permasalahan) dapat digunakan oleh setiap unit kerja, sebagai contoh klasifikasi masalah "keuangan" tidak berarti bahwa yang boleh menggunakan hanya "Biro Umum dan Keuangan" saja, tetapi Unit Kerja lain dapat menggunakannya.

Tujuan penggunaan klasifikasi arsip untuk dapat mengelompokkan arsip yang masalahnya sama dalam satu berkas, mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis, dan untuk memudahkan dalam kegiatan penemuan kembali.

Klasifikasi disusun berdasarkan pada pengelompokan menurut masalah (*subject*). Kegiatan yang terdiri dari beberapa masalah pokok (*main subject*) dan setiap masalah pokok dapat terdiri dari beberapa sub masalah (*sub subject*) dan tiap sub-sub masalah (*sub-sub subject*).

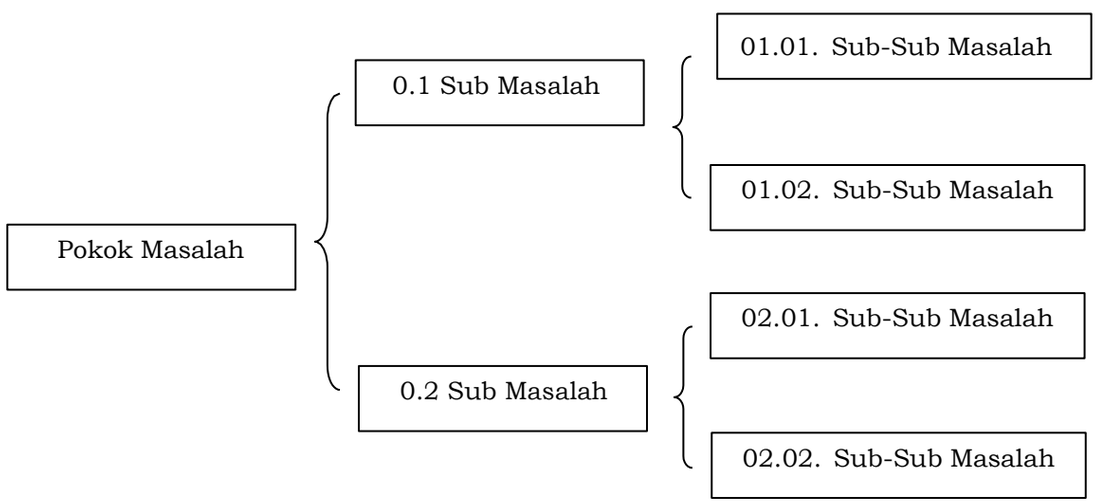

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Contoh klasifikasi arsip masalah keuangan:

Pokok Masalah	Sub Masalah	Sub-Sub Masalah
1	2	3
KU. Keuangan	01. Pelaksanaan Anggaran	01.00 Belanja Pegawai
		01.01 Belanja Barang
		01.02 Dst.
	02. Pengelolaan Perbendaharaan	02.00 Perbendaharaan
		02.01 Laporan Pertanggungjawaban
		02.01 Dst.

B. Kode Klasifikasi

Pemberian kode merupakan kegiatan pemberian tanda pengenal pada arsip, dengan maksud untuk menyingkat tulisan dalam mengenali masalahnya. Sistem yang dipergunakan untuk pemberian kode di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah alfanumerik yaitu penggabungan kode huruf dan angka. Kode huruf digunakan untuk mengenali masalah pokok, sedangkan kode angka untuk sub masalah dan sub-sub masalah.

Contoh 1 (Fasilitatif) :

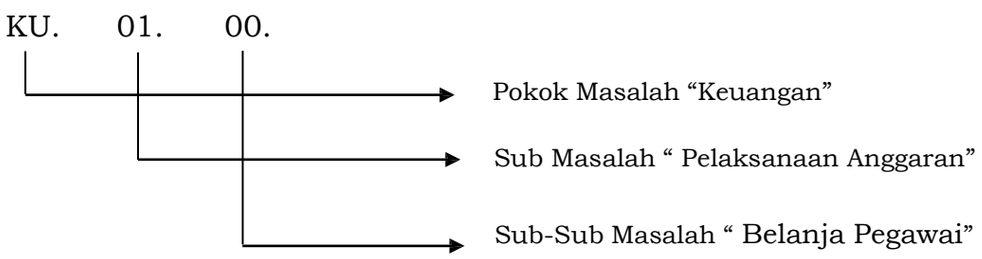

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penggunaan kode klasifikasi arsip KU.01.00. adalah untuk sub-sub masalah yang ada kaitannya dengan kegiatan belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan termasuk tunjangan kinerja dan remunerasi, honorarium, uang lembur, uang makan, pensiun, biaya kecelakaan, biaya pemakaman, penggajian pegawai honorer, dan vakasi.

Contoh 2 (Substantif) :

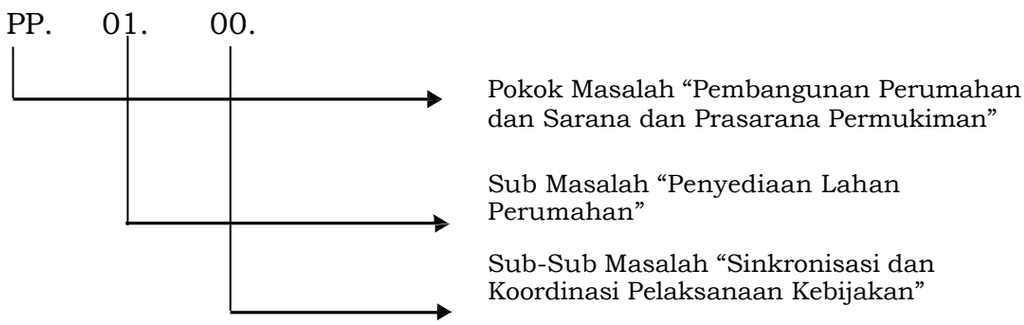

Penggunaan kode klasifikasi arsip PP.01.00 adalah untuk sub-sub masalah yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyediaan lahan perumahan.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

PEDOMAN PENERAPAN
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

I. PENDAHULUAN

Arsip merupakan salah satu informasi yang memiliki kekuatan hukum, karena arsip merupakan informasi terekam atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan aktivitas setiap lembaga penciptanya. Arsip sangat signifikan dalam menjawab keinginan masyarakat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sehingga mempercepat perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan arsip menjadi penting bukan hanya pengelolaan fisik tetapi juga pengelolaan informasi sejak arsip diciptakan, digunakan, dipelihara sampai dengan disusutkan.

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan salah satu elemen pokok yang harus dipenuhi dalam pengelolaan arsip dinamis pada setiap lembaga negara sebagai pencipta arsip termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pada Pasal 40 Ayat (4) bahwa Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan akutabilitas informasinya.

Melalui sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

II. KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP

Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, negara, masyarakat, dan perorangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kerahasiaan atau keterbukaan arsip menyangkut kewajiban untuk merahasiakan informasi tertentu kepada pihak yang tidak berhak. Klasifikasi keamanan arsip dinamis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Biasa/Terbuka

   Klasifikasi informasi arsip yang apabila diketahui oleh publik tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Terbatas

   Klasifikasi informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
3. Rahasia

   Klasifikasi informasi arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

III. PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP

1. Sarana Prasarana
   a. sarana penyimpanan Arsip Konvensional, berupa:
      1) lemari Arsip untuk menyimpan Arsip Biasa/Tebuka dan Terbatas;
      2) brankas/lemari besi untuk menyimpan Arsip Rahasia;
   b. sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
   c. prasarana, berupa ruang penyimpanan dan/atau gedung penyimpanan yang *representative* sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
   d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/ *cctv*, kunci pengamanan ruangan, tabung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pemadam kebakaran, dan/atau media simpan arsip berbasis elektronik maupun non-elektronik;

2. Daftar Arsip Terbatas dan Daftar Arsip Rahasia

   Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk ke dalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *record centre* dan *central file*.

3. Sumber Daya Manusia

   Pengamanan arsip dinamis dikoordinasikan oleh Unit Kearsipan sesuai jenjangnya dan dilaksanakan oleh Pejabat Struktural di bidang kearsipan, dan/atau pejabat fungsional arsiparis di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Dalam hal belum tersedia Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pengolah dan di Unit Kearsipan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menugaskan Pejabat Administrasi untuk melaksanakan tugas Pengamanan Arsip Dinamis sebagai pelaksana Arsip.

IV. KLASIFIKASI AKSES ARSIP

Pengguna yang berhak untuk mengakses arsip meliputi pengguna internal dan eksternal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

1. Pengguna Internal

   Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu:

   a. Menteri Koordinator mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip;
   b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwenang mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya dan diberikan akses untuk informasi yang terdapat pada level tertinggi dengan izin pimpinan tingkat tertinggi;
   c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang mengakses Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada Menteri Koordinator dan Pimpinan Tinggi Madya, kecuali telah mendapatkan izin;
   d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan staf berwenang mengakses seluruh Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi Biasa.

e. Pengawas Internal berwenang mengakses seluruh Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pengguna Eksternal

Pengguna yang diberikan hak akses di lingkungan eksternal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu:

a. Publik, dapat mengakses Arsip yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pengawas Eksternal berwenang mengakses seluruh Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
c. Aparat penegak hukum berwenang mengakses Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NO	KODE KLASIFIKASI			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	PR			PERENCANAAN					
		PR.00		Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategis Pembangunan					
			PR.00.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/*Master Plan*	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)//Master Plan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.00.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.00.02	Rencana Strategis (Renstra)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.00.03	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nasional			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.00.04	Dokumen Rencana Terpadu Program Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Lintas Kementerian/Lembaga	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan, dan penyerasian rencana terpadu program Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan lintas Kementerian/Lembaga			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PR.00.05	Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		PR.01		Perencanaan Kinerja dan Anggaran					
			PR.01.00	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mulai dari pengumpulan bahan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), penelaahan usulan unit kerja, pemrosesan dan penetapan pagu indikatif, pagu definitif, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.01.01	Rencana Kerja Tahunan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.01.02	Inisiatif Baru	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program dan anggaran berdasarkan inisiatif baru			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		PR.02		Revisi Dokumen Kinerja dan Anggaran					
			PR.02.00	Revisi Dokumen Anggaran	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.02.01	Anggaran Belanja Tambahan (ABT)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran yang disebabkan oleh adanya ABT			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.02.02	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran yang disebabkan oleh adanya APBNP			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PR.02.03	Revisi Dokumen Kinerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan revisi dokumen kinerja	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		PR.03		Perencanaan, Pengelolaan, Pengukuran, Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja					
			PR.03.00	Penyusunan, Penetapan, Indikator Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual Indikator Kerja Utama (IKU)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual Indikator Kerja Utama (IKU), antara lain: dokumen pembahasan, rancangan awal dan akhir, hingga penetapan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.03.01	Perjanjian Kinerja Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan kinerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pimpinan Tinggi Madya			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.03.02	Perjanjian Kinerja Eselon II ke bawah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penetapan kinerja Eselon II ke bawah			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.03.03	Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.03.04	Pelaporan Kinerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.03.05	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan analisis, monitoring, dan evaluasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		PR.04		Laporan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PR.04.00	Laporan Berkala	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja seperti laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.04.01	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan LAKIP			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.04.02	Laporan Khusus/Insidental	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan khusus/insidental lembaga/instansi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.04.03	Laporan Perkembangan *(Progress Report)*	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		PR.05		Evaluasi Program					
			PR.05.00	Evaluasi Program Unit Kerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program unit kerja	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			PR.05.01	Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi program kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
2	OT			ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
		OT.00		Organisasi					
			OT.00.00	Penataan Organisasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penataan organisasi meliputi usulan organisasi dan tata kerja, uraian tugas dan fungsi, naskah akademis, pedoman, dan perumusan organisasi dan tata kerja meliputi penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pelaporan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			OT.00.01	Evaluasi Organisasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi (usulan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaporan) organisasi meliputi usulan evaluasi, penyusunan instrumen dan monitoring evaluasi organisasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			OT.00.02	Budaya Kerja Organisasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan usulan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaporan, dan penerapan budaya kerja organisasi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		OT.01		Penataan Instrumen Jabatan					
			OT.01.00	Analisis Jabatan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan analisis jabatan struktural, fungsional, dan jabatan pelaksana	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			OT.01.01	Analisis Beban Kerja (ABK)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja jabatan dan unit kerja serta pemetaan kekuatan pegawai di unit kerja			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			OT.01.02	Standar Kompetensi Jabatan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan struktural, fungsional, dan jabatan pelaksana			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			OT.01.03	Peta Jabatan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan peta jabatan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			OT.01.04	Evaluasi Jabatan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		OT.02		Tata Laksana					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			OT.02.00	Proses Bisnis	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses bisnis meliputi penyusunan finalisasi, penetapan, monitoring, dan evaluasi proses bisnis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			OT.02.01	Standar Operasional Prosedur	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur meliputi penyusunan finalisasi, penetapan, monitoring, dan evaluasi Standar Operasional Prosedur			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			OT.02.02	Pedoman Ketatalaksanaan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pedoman ketatalaksanaan untuk menindaklanjuti organisasi dan tata kerja meliputi penyusunan akronim, singkatan nama, nomenklatur bahasa inggris, dan dokumen pedoman lainnya terkait ketatalaksanaan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		OT.03		Reformasi Birokrasi					
			OT.03.00	Perencanaan Reformasi Birokrasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan Reformasi Birokrasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			OT.03.01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			0T.03.02	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
3	KP			KEPEGAWAIAN					
		KP.00		Pengadaan Pegawai					
			KP.00.00	Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai meliputi bezetting/Persediaan Pegawai, usulan formasi pegawai (ASN dan non ASN), dan perencanaan kebutuhan pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KP.00.01	Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil, ujian seleksi calon pegawai negeri sipil, hingga pengumuman kelulusan termasuk berkas pelamar tidak lulus seleksi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.00.02	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengangkatan PNS meliputi penyelesaian surat keputusan CPNS, pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, penyelesaian surat keputusan pemberhentian CPNS atas permintaan sendiri, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS dan pengambilan sumpah PNS	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.00.03	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.00.04	Administrasi Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pegawai meliputi pengusulan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg), pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (Karis/Karsu), dan pengusulan Pembuatan Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.00.05	Berkas Perseorangan Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai lamaran sampai dengan pensiun pegawai	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.00.06	Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi PPPK meliputi pengumuman seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ujian seleksi calon PPPK, dan pengumuman kelulusan termasuk berkas pelamar tidak lulus seleksi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.00.07	Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengangkatan PPPK meliputi administrasi pelamar lulus seleksi, bahan penyusunan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pemanggilan peserta pelatihan dasar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahan penyelesaian surat keputusan, dan pemberhentian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atas permintaan sendiri	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.00.08	Pegawai Perbantuan (Magang, Honorer, PKWT)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Pegawai Perbantuan, surat keputusan pengangkatan, surat kriteria/ralat perjanjian kerja, surat keputusan berhenti perjanjian kerja	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		KP.01		Mutasi Pegawai					
			KP.01.00	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Struktural dan Fungsional	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan dan usulan kenaikan pangkat meliputi kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat luar biasa, pencantuman gelar, dan peninjauan masa kerja	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.01	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pelaksana, Struktural/Fungsional	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, struktural/fungsional termasuk di dalamnya pelantikan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.02	Pensiun	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pensiun pegawai ASN, perekaman dan pemeliharaan data pensiun, penetapan pensiun, dan penetapan pertimbangan teknis pensiun ASN			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.03	Alih Jabatan dan Perpindahan Jabatan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan alih jabatan dan perpindahan jabatan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.04	Kenaikan Gaji Berkala	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses kenaikan gaji berkala			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.05	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Unit Kerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar unit kerja			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.06	Penyesuaian Tunjangan Keluarga	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.07	Penyesuaian Kelas Jabatan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyesuaian kelas jabatan sehubungan dengan perubahan jabatan pegawai			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KP.01.08	Mutasi Keluarga	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses mutasi data keluarga termasuk pernikahan/perceraian, kelahiran anak, adopsi anak, meninggal dunia pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.01.09	Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		KP.02		Pengembangan Pegawai					
			KP.02.00	Pengembangan Karier	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan usulan pengembangan karier meliputi peningkatan golongan dan pendidikan sesuai kebutuhan organisasi termasuk di dalamnya tugas belajar, pendidikan dan pelatihan penjenjangan, diklat fungsional, diklat teknis, seminar, *workshop*, webinar, kursus, magang serta pelaksanaan ujian dinas, penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat, dan kegiatan pengembangan karir lainnya.	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.02.01	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai meliputi usulan penilaian sasaran kinerja pegawai, usulan penilaian kinerja, usulan penilaian kerja, perilaku kerja, hasil evaluasi sasaran kinerja pegawai termasuk di dalamnya pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional dan juga Penetapan Angka Kredit (PAK)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.02.02	Penilaian dan Hasil Kompetensi Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi pegawai sampai dengan penilaian kompetensi pegawai termasuk ujian kompetensi/*assessment test* dan hasil penilaian kompetensi pegawai	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.02.03	Penilaian dan Hasil Kompetensi Pegawai Pejabat Eselon I dan II	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi pejabat Eselon I dan II sampai dengan penilaian kompetensi pegawai termasuk ujian kompetensi/ *assessment test* dan hasil penilaian kompetensi pejabat Eselon I dan II	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KP.02.04	Manajemen Talenta	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sistem merit dan manajemen talenta	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.02.05	Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi pegawai dan pembinaan mental pegawai termasuk di dalamnya kegiatan keagamaan dan *capacity building*	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.02.06	Pendelegasian Wewenang	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt.) dan pelaksana harian (Plh.)	Biasa	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.02.07	Berkas Tim Penilai Kinerja Pegawai (TPKP)/Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat, termasuk di dalamnya pembentukan tim, usulan promosi jabatan, perencanaan, pengumpulan dan penyusunan bahan, penyelenggaraan dan hasil Baperjakat	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		KP.03		Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai					
			KP.03.00	Penegakan Disiplin Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penegakan disiplin pegawai meliputi pemberhentian sementara sebagai PNS, pemberhentian PNS, hukuman disiplin (tingkat ringan, sedang, dan berat), penetapan status kepegawaian dan pengaduan masyarakat/permasalahan umum	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.03.01	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian mulai dari proses pengajuan sampai dengan penetapan termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KP.03.02	Kesejahteraan Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai meliputi izin perkawinan dan perceraian, pemberian cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti besar, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), pengajuan, pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Tabungan Perumahan (Taperum) dan keanggotaan pegawai dalam organisasi sosial	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.03.03	Penghargaan Tanda Jasa	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa termasuk di dalamnya pemberian satyalancana karya satya	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.03.04	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai meliputi penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti medical *check-up* PNS/ASN dan CPNS/CASN, serta kegiatan peningkatan wawasan kesehatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.03.05	Layanan Bantuan Sosial	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, dan sumbangan lainnya	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.03.06	Fasilitas Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas pegawai seperti pakaian dinas pegawai, ruang menyusui, penitipan anak, perumahan, transportasi antar jemput pegawai, dan fasilitas lainnya	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.03.07	Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan layanan pengurusan jenazah pegawai	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.03.08	Tata Usaha Kepegawaian	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan pakta integritas, presensi dan monitoring pegawai, pengurusan Kartu Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), pengurusan Kartu Keanggotaan Organisasi Profesi atau Kedinasan, pengurusan tentang kartu jaminan kesehatan, pengurusan Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4), pengurusan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP, pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KP.03.09	Organisasi Non-Kedinasan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan organisasi non-kedinasan meliputi kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dharma Wanita, Koperasi, dan Yayasan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		KP.04		Sistem Informasi Kepegawaian					
			KP.04.00	Pengolahan Data Kepegawaian	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan database kepegawaian/aparatur sipil negara dan penyelesaian permasalahan data kepegawaiaan Aparatur Sipil Negara	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.04.01	Informasi Kepegawaian	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non Aparatur Sipil Negara dan Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			KP.04.02	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi kepegawaian			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
4	KU			KEUANGAN					
		KU.00		Tata Laksana Keuangan atau Tata Kelola Keuangan					
			KU.00.00	Pedoman/Kebijakan terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Pedoman/Kebijakan terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.00.01	Pendapatan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, penerimaan sisa anggaran lebih dari saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja (SSPB), bunga, dan/atau jasa giro pada bank, piutang negara, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.00.02	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KU.00.03	Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KU.01		Pelaksanaan Anggaran					
			KU.01.00	Belanja Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan termasuk tunjangan kinerja dan remunerasi, honorarium, uang lembur, uang makan, pensiun, biaya kecelakaan, biaya pemakaman, penggajian pegawai honorer, dan vakasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.01.01	Belanja Barang	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belanja barang dan jasa meliputi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, dan belanja jasa				
			KU.01.02	Belanja Modal	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belanja modal meliputi pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya				
			KU.01.03	Pengeluaran Anggaran	Rekaman kegiatan dinas yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran meliputi Rencana Penarikan Dana (RPD), Rencana Pelaksana Kegiatan (RPK), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SSP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan APBN dan bahan nota keuangan, dan lain-lain				
		KU.02		Pengelolaan Perbendaharaan					
			KU.02.00	Perbendaharaan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pejabat pengelola keuangan berupa penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kuasa Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, dan Pengelola Barang	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.02.01	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KU.02.02	Pajak	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran pajak	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.02.03	Pembukuan Anggaran	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan, termasuk Rekening Koran Bank, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran, Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.02.04	Verifikasi Anggaran	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan verifikasi anggaran yaitu kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.02.05	Rekening Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rekening pemerintah dan kartu kredit pemerintah	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.02.06	Kartu Gaji	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kartu gaji pegawai	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.02.07	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KU.03		Ketatausahaan Keuangan					
			KU.03.00	Keterangan Penghasilan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan keterangan penghasilan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KU.03.01	Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan SKPP	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.03.02	Permohonan Pinjaman	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan permohonan pinjaman			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.03.03	Iuran Keanggotaan Organisasi	Rekaman kegiatan yang. berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi, baik tingkat nasional maupun internasional, mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai pelaporan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KU.04		Akutansi dan Laporan Keuangan Tahunan					
			KU.04.00	Laporan Keuangan Bulanan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi, penyusunan dan penetapan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal/Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Realisasi Pendapatan Negara, dan Laporan Barang Milik Negara	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.04.01	Laporan Keuangan Triwulan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, penyusunan dan penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal/Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Realisasi Pendapatan Negara, dan Laporan Barang Milik Negara			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.04.02	Laporan Keuangan Semesteran	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akuntasi, penyusunan dan penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal/Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Realisasi Pendapatan Negara, dan Laporan Barang Milik Negara			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.04.03	Laporan Keuangan Tahunan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi, penyusunan dan penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal/Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Realisasi Pendapatan Negara, dan Laporan Barang Milik Negara			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KU.04.04	Penyiapan Bahan Analisis Akuntansi Kementerian	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan analisis akuntansi kementerian	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KU.04.05	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Satuan Kerja, Unit Kerja Eselon I, dan Kementerian			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KU.05		Pertanggungjawaban Keuangan Negara					
			KU.05.00	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berupa perhitungan anggaran dan pelaporan berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum dan Keuangan
			KU.05.01	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan hasil pengawasan dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum dan Keuangan
			KU.05.02	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan laporan aparat pemeriksa fungsional berupa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), MHP, Tindak Lanjut/Tanggapan LHP			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum dan Keuangan
			KU.05.03	Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian kerugian keuangan Negara berupa Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR)			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Umum dan Keuangan
5	HK			HUKUM					
		HK.00		Program Legislasi					
			HK.00.00	Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Instansi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan/materi program legislasi terkait Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan maupun program legislasi nasional	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			HK.00.01	Program Legislasi terkait Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi terkait Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		HK.01		Rancangan Peraturan Perundang-undangan					
			HK.01.00	Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan/atau Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.01.01	Rancangan Peraturan Pemerintah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan/atau Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.01.02	Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Presiden	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan/atau Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.01.03	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sejak tahap rencana penyusunan/pengajuan sampai dengan pengundangan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.01.04	Keputusan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sejak tahap rencana penyusunan/pengajuan sampai dengan ditetapkan oleh Menteri Koordinator dan Pejabat Tingkat Eselon I			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.01.05	Instruksi/Surat Edaran	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan instruksi/surat edaran suatu permasalahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			HK.01.06	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis yang Bersifat Internasional/Nasional/Regional	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis yang bersifat internasional/nasional/ regional mulai rancangan awal sampai dengan penetapan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.01.07	Rancangan Keputusan Bersama	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan Bersama yang meliputi rancangan awal sampai dengan rancangan akhir			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		HK.02		Dokumentasi Hukum					
			HK.02.00	Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan dokumentasi informasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.02.01	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum dalarn rangka penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.02.02	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemberian bantuan/konsultasi hukum/advokasi bidang litigasi dan non litigasi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		HK.03		Kasus/Sengketa Hukum di Bidang Litigasi dan Non Litigasi					
			HK.03.00	Pidana	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pembelaan serta upaya dan bantuan hukum sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.03.01	Perdata	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus perdata			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.03.02	Tata Usaha Negara	Rekaman kegiatan, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan proses kasus Tata Usaha Negara (TUN)			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			HK.03.03	Non Litigasi	Rekaman kegiatan, telaah hukum, opini hukum, bantuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan proses tentang kasus non litigasi	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		HK.04		Perizinan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perizinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat izin	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
		HK.05		Telaah Hukum					
			HK.05.00	Telaah Hukum Internal	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang- undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.05.01	Telaah Hukum EksternaI	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan pejabat berwenang instansi lain			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.05.02	Telaah Perjanjian	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penelaahan kontrak, perjanjian, dan kerja sama			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.05.03	Telaah Akta	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penelaahan akta, dan berita acara			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
			HK.05.04	Telaah Masalah Umum	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen penelaahan berita acara, dan kasus/sengketa hukum pidana/perdata/tata usaha negara/arbitrase			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
6	KS			KERJA SAMA					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		KS.00		Kerja Sama Dalam Negeri	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding* /Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri, Rancangan/Draf Awal, Rancangan/Draf Akhir, Memori Perjanjian, dan naskah asli yang ditandatangani	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		KS.01		Kerja Sama Luar Negeri					
			KS.01.00	Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* /Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama Regional	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding* /Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Regional, Rancangan/Draf Awal, Rancangan/Draf Akhir, Memori Perjanjian, dan naskah kegiatan asli yang ditandatangani	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			KS.01.01	Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* /Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama Multilateral	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding*/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Multilateral, Rancangan/Draf Awal, Rancangan/Draf Akhir, Memori Perjanjian, dan naskah kegiatan asli yang ditandatangani			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			KS.01.02	Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* /Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama Bilateral	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan *Memorandum of Understanding* /Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Bilateral, Rancangan/Draf Awal, Rancangan/Draf Akhir, Memori Perjanjian, dan naskah kegiatan asli yang ditandatangani			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
			KS.01.03	Administrasi Kerja Sama Luar Negeri	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama luar negeri			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
		KS.02		Evaluasi Periodik atas Produk Hukum/Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan berkas evaluasi periodik atas produk hukum/nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah dilakukan	Terbatas	Publik	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
7	SD			PERSIDANGAN					
		SD.00		Rapat Tingkat Menteri					
			SD.00.00	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, termasuk di dalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notula, dan *resume* persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			SD.00.01	Rapat Terbatas Tingkat Menteri (Ratas Tingkat Menteri)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Terbatas Tingkat Menteri, termasuk di dalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notula, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			SD.00.02	Rapat Menteri dengan Majelis Pemusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Menteri dengan Majelis Pemusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notula, dan *resume* persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		SD.01		Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk di dalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notula, dan *resume* persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		SD.02		Rapat Internal					
			SD.02.00	Rapat Internal Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, termasuk di dalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notula, dan *resume* persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			SD.02.01	Rapat Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembanguan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, termasuk di dalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notula, dan *resume* persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		SD.03		Penyiapan Naskah Menteri					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			SD.03.00	Pengumpulan Bahan Naskah Menteri	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyiapan bahan naskah Menteri, serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			SD.03.01	Pengolahan dan Harmonisasi Bahan Naskah Menteri	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan harmonisasi bahan naskah Menteri serta penyajian dokumen naskah Menteri			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			SD.03.02	Dokumentasi Naskah Menteri	Rekaman kegiatan terkait penatausahaan dan digitalisasi naskah Menteri			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
8	KA			KEARSIPAN					
		KA.00		Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis					
			KA.00.00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan pengelolaan arsip dinamis meliputi tata naskah dinas, kode klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, dan pengelolaan arsip dinamis	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.00.01	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis meliputi sosialisasi, fasilitasi, seminar, dan lain-lain			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KA.01		Penciptaan Arsip					
			KA.01.00	Pengelolaan Surat Masuk	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.01.01	Pengelolaan Surat Keluar	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KA.02		Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KA.02.00	Pengelolaan Arsip Aktif	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemberkasan meliputi pemeriksaan tanda perintah file/simpan, memberi indeks dan klasifikasi pada surat, mencatat pada daftar arsip aktif, memasukkan surat ke folder dan menempatkan di *filing cabinet*	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	
			KA.02.01	Pengelolaan Arsip Inaktif	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip inaktif meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.02.02	Pengelolaan Arsip Vital	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip vital meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.02.03	Pengelolaan Arsip Terjaga	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip terjaga meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.02.04	Pengelolaan Arsip Audio Visual	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip audio visual meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.02.05	Pengelolaan Arsip Elektronik	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan arsip elektronik meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan hingga pengolahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.02.06	Alih Media Arsip	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan alih media arsip meliputi berita acara alih media arsip, daftar arsip dinamis yang dialihmediakan, dan lain-lain			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.02.07	Layanan Arsip	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip yang meliputi peminjaman arsip, pelayanan arsip di tempat/baca di tempat dan penggandaan/fotokopi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KA.02.08	Pemeliharaan Fisik Arsip	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan meliputi pemberian kamper, fumigasi dan lain sebagainya	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KA.03		Penyusutan					
			KA.03.00	Pemindahan Arsip	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip meliputi daftar arsip yang dipindahkan dan berita acara pemindahan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.03.01	Pemusnahan Arsip	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip meliputi surat keputusan tim pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan, surat pertimbangan penilaian dari unit pencipta arsip, surat permohonan persetujuan pemusnahan ke Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari ANRI, surat keputusan pemusnahan dan berita acara pemusnahan.			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.03.02	Penyerahan Arsip Statis	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip statis meliputi akuisisi arsip, daftar arsip yang diserahkan, surat keputusan penyerahan dan berita acara penyerahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		KA.04		Sumber Daya Kearsipan					
			KA.04.00	Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan (unit kearsipan dan unit pengolah) yang meliputi supervisi penyelenggaraan kearsipan, bimbingan teknis penyelenggaraan kearsipan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.04.01	Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi laporan final pengawasan kearsipan internal, laporan final akreditasi kearsipan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.04.02	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kompetensi sumber daya manusia kearsipan meliputi sosialisasi, fasilitasi, dan seminar pembinaan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, organisasi profesi arsiparis, administrasi sertifikasi arsiparis, administrasi pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis, dan administrasi pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KA.04.03	Apresiasi Sumber Daya Kearsipan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Apresiasi Sumber Daya Kearsipan meliputi Penetapan Pemenang Lomba Arsiparis Teladan dan Penetapan Pemenang Lomba Unit Pengolah dan Unit Kearsipan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			KA.04.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana meliputi gedung, ruangan dan peralatan kearsipan (*roll o pack*, *filing cabinet*, boks arsip, folder, sekat, dan lain-lain)	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
9	BJ			BARANG DAN JASA					
		BJ.00		Pengadaan Barang dan Jasa					
			BJ.00.00	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen usulan kebutuhan pengadaan, persetujuan RUP, kaji ulang RUP, persetujuan kaji ulang RUP	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			BJ.00.01	Tender Seleksi (Sederhana)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan tender/seleksi meliputi persiapan, penyusunan data tender/seleksi, undangan review paket tender/seleksi, proses pelaksanaan tender/seleksi, evaluasi, pengumuman, jawaban atas sanggahan, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil tender/seleksi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			BJ.00.02	Tender Cepat	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan tender cepat meliputi persiapan, penyusunan data tender cepat, undangan reviu paket tender cepat, proses pelaksanaan tender cepat evaluasi, pengumuman, jawaban atas sanggahan, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil tender/seleksi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			BJ.00.03	Pengadaan Langsung	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan langsung meliputi persiapan, penyusunan data pengadaan langsung, undangan reviu paket pengadaan langsung, proses pelaksanaan pengadaan langsung, evaluasi, pengumuman, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil pengadaan langsung			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			BJ.00.04	*e-Purchasing*	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan e-purchasing meliputi persiapan, penyusunan data e-purchasing, undangan reviu paket e-purchasing, proses pelaksanaan e-purchasing, evaluasi, pengumuman, penugasan, berita acara selama proses pemilihan dan hasil pemilihan, kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan hasil e-purchasing	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		BJ.01		Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					
			BJ.01.00	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			BJ.01.01	Kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kontrak kerja sama pemerintah dengan badan usaha			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			BJ.01.02	Katalog Elektronik Sektoral	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan katalog elektronik sektoral			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
10	RT			RUMAH TANGGA DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)					
		RT.00		Pelayanan Kerumahtanggaan					
			RT.00.00	Pelayanan Umum	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi perencanaan kebutuhan prasarana, sarana, dan pengelolaan ruang kerja, pengelolaan ruang pertemuan/rapat/lapangan upacara, peminjaman prasarana dan sarana kantor	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.00.01	Pelayanan Khusus	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan kepada pimpinan, penyediaan petugas kebersihan dan penyediaan petugas pendukung lainnya			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.00.02	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pakaian dinas pegawai satuan pengamanan, tenaga honorer, pramubakti, petugas kebersihan dan petugas pendukung lainnya			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		RT.01		Pemeliharaan dan Perbaikan				
			RT.01.00	Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan gedung, izin renovasi/perbaikan ruang kerja/gedung dan pembangunan gedung	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.01.01	Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Dinas/Wisma/Gudang	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan rumah dinas/wisma/gudang, izin renovasi/perbaikan ruang kerja/gedung dan izin penggunaan rumah dinas dan izin pembangunan rumah dinas/wisma/gudang			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.01.02	Pertamanan/*Landscaping*/Penghijauan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan pertamanan/*landscaping*			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.01.03	Peralatan Kantor, Mesin dan Pengolah Data	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor, mesin dan pengolah data			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.01.04	Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kantor			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.01.05	Pengelolaan Jaringan (Telepon, Internet, Listrik, Air, TV)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan, pemeliharaan, pemasangan jaringan (Telepon, Internet, Listrik, Air, TV)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.01.06	Pengelolaan Kendaraan Dinas	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat-surat kendaraan dinas, penatausahaan pengelolaan, perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan dinas			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		RT.02		Ketertiban dan Keamanan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			RT.02.00	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengambilan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, serta rumah dinas seperti daftar piket satuan pengamanan/*security*, buku/ formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan, kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan pengaturan perparkiran	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.02.01	Pemantauan dan Pelaporan Ketertiban dan Keamanan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan pelaporan ketertiban dan keamanan seperti kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		RT.03		Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan barang milik negara meliputi pengadaan barang habis pakai, pengadaan barang bergerak, pengadaan barang tidak bergerak/investasi/aset dan pengadaan jasa, perencanaan terkait pemeliharaan barang milik negara, dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		RT.04		Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)					
			RT.04.00	Pembukuan BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan BMN dan penyusunan daftar barang pengguna/daftar Barang Kuasa Pengguna dan daftar BMN.	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.04.01	Inventarisasi BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi barang milik negara meliputi inventarisasi umum/mutasi barang/serah terima aset/berita acara hibah, standardisasi/kodefikasi, pelaporan persediaan dan barang milik negara (tanah, gedung, wisma, rumah dinas, alat teknik, kendaraan dinas, buku pustaka, alat kantor mesin, dan alat kantor bukan mesin)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.04.02	Penggunaan BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan BMN meliputi penetapan status penggunaan, alih status penggunaan, penggunaan sementara, dioperasionalkan pihak lain, dan barang milik negara *idle*			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.04.03	Pemanfaatan BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang milik negara meliputi dokumen sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			RT.04.04	Asuransi BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengasuransian barang milik negara, meliputi pembuatan usulan asuransi, persiapan pengadaan jasa asuransi, persiapan pemilihan penyedia jasa asuransi, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan dan penandatanganan kontrak asuransi, berita acara serah terima polis asuransi, *endorsement*, dan klaim asuransi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.04.05	Penghapusan BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan berupa standardisasi/petunjuk teknis penghapusan, usulan penghapusan, data dan dokumen pendukung, penilaian dalam rangka penghapusan, penetapan penghapusan, dokumen terkait penyebab penghapusan antara lain dokumen penyerahan kepada Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan barang milik negara kepada Pengguna Barang lain, pemindahtanganan barang milik negara, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan, pemusnahan barang milik negara, atau sebab-sebab lain, berita acara pemeriksaan/penelitian, berita acara penghapusan, berita acara serah terima barang milik negara yang dihibahkan dan Rekaman kegiatan hibah barang milik negara			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.04.06	Pelaporan BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan laporan barang milik negara meliputi laporan unit akuntansi pengguna/unit akuntansi pembantu pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), laporan barang milik negara, laporan persediaan, laporan pengawasan dan pengendalian, laporan rencana kebutuhan, laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan akuntansi barang milik negara.			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		RT.05		Pengawasan dan Pengendalian BMN	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		RT.06		Penatausahaan Barang Persediaan					
			RT.06.00	Distribusi Barang Persediaan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian barang persediaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			RT.06.01	Laporan Barang Persediaan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Persediaan secara berkala yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11	HM			KEHUMASAN				
		HM.00		Peliputan dan Dokumentasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti foto, video, rekaman suara, dan multimedia sebagai gambaran jalannya peristiwa	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		HM.01		Penyajian Informasi				
			HM.01.00	Bahan dan Hasil Penerbitan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bahan, hasil, dan master penerbitan buletin, *newsletter*, majalah, buku kelembagaan, dan video kelembagaan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.01.01	Pers/Media Massa/*Pers On The Spot*	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan siaran pers/konferensi pers/*press release*/wawancara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta *pers on the spot*/kunjungan wartawan dan peliputan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.01.02	Pengelolaan Web dan Media Sosial Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan pengelolaan web dan media sosial milik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		HM.02		Pengelolaan Informasi Publik				
			HM.02.00	Organisasi Pengelola Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Organisasi Pengelola Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.02.01	Pelayanan Informasi Publik	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan surat/formulir permohonan informasi publik, tanda terima informasi publik, hasil koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan informasi, surat persetujuan/penolakan pemberian informasi publik, formulir pengajuan keberatan informasi publik, surat dari atasan PPID terkait dengan keberatan permohonan, daftar register pemohon informasi publik, daftar register pengajuan keberatan informasi publik			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.02.02	Daftar Informasi Publik	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan daftar informasi publik			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			HM.02.03	Laporan Kepuasan Layanan Informasi Publik/Masyarakat	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan laporan kepuasan layanan informasi publik/masyarakat	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.02.04	Analisis Opini Publik	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan analisis opini publik meliputi kegiatan pemantauan, analisis dan rekomendasi atas perkembangan opini publik			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		HM.03		Hubungan Antar Lembaga					
			HM.03.00	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.03.01	Hubungan dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan hubungan dengan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.03.02	Hubungan dengan Badan Usaha	Rekaman kegiatan yang berhubungan dengan Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta serta Koperasi)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.03.03	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Rekaman kegiatan yang berhubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk Magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.03.04	Forum Kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/ Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Badan Koordinasi Kehumasan Masyarakat/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia)			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.03.05	Hubungan dengan Media Massa	Rekaman kegiatan yang berkaitan hubungan dengan Media Massa termasuk siaran pers, kunjungan wartawan/peliputan dan wawancara			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		HM.04		Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan					
			HM.04.00	Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemberian tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			HM.04.01	Ucapan Duka/Terima Kasih/Permohonan maaf	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan ucapan (terima kasih, bela sungkawa, atau permohonan maaf) kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		HM.05		Perpustakaan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan koleksi perpustakaan, pengadaan bahan pustaka melalui pembelian, hibah, sumbangan maupun kerja sama, pengolahan bahan perpustakaan seperti permintaan nomor *International Standard Book Number* (ISBN), inventarisasi, katalogisasi, klasifikasi, input *database,* penataan koleksi, pelayanan perpustakaan seperti literasi informasi, penelusuran referensi, layanan sirkulasi/peminjaman, pengembangan, perawatan/pelestarian bahan dan koleksi perpustakaan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
12	TU			KETATAUSAHAAN DAN KEPROTOKOLAN					
		TU.00		Tata Usaha Menteri/Pimpinan					
			TU.00.00	Agenda Pimpinan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan agenda Menteri/Pimpinan mulai dari perencanaan, penjadwalan dan pelaksanaan agenda pimpinan termasuk undangan kegiatan, susunan kegiatan/*rundown* acara, surat tugas dan laporan terkait kegiatan/perjalanan pimpinan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			TU.00.01	Sambutan/Pidato	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan penyiapan sambutan/pidato meliputi bahan sambutan/pidato Presiden di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan termasuk sambutan/pidato Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan/pejabat pimpinan tinggi madya serta bahan paparan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
		TU.01		Keprotokolan					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			TU.01.00	Upacara/Acara Kedinasan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			TU.01.01	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
			TU.01.02	Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan permintaan izin perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meliputi izin, Surat Persetujuan (SP) Sekretariat Negara, paspor, visa dan *exit permit*			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Umum dan Keuangan
13	PW			PENGAWASAN					
		PW.00		Perencanaan Kebijakan Pengawasan					
			PW.00.00	Perencanaan Pengawasan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana, dan program pengawasan	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.00.01	Kerja Sama Pengawasan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan kerja sama pengawasan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
		PW.01		Audit/Pemeriksaan					
			PW.01.00	Audit Keuangan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas organisasi/unit kerja, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
			PW.01.01	Audit Kinerja	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi audit kepegawaian, audit pengelolaan keuangan negara, audit pengelolaan Barang Milik Negara, dan audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut hasil audit			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PW.01.02	*Probity* Audit	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan *probity* audit meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
			PW.01.03	Audit dengan Tujuan Tertentu	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan audit tujuan tertentu, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		PW.02		Reviu					
			PW.02.00	Reviu Laporan Keuangan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan baik semesteran dan tahunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reviu	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.02.01	Reviu RKA-KL	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu RKAKL meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reviu			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.02.02	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reviu			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.02.03	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RK-BMN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reviu			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.02.04	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.02.05	Reviu Lainnya	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan reviu lainnya sesuai permintaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan dan tindak lanjut hasil audit			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		PW.03		Evaluasi					
			PW.03.00	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.03.01	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi (RB)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring pelaksanaan RB dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Bidang Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.03.02	Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.03.03	Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian Zona Integritas			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.03.04	Evaluasi lainnya	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi lainnya sesuai permintaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
		PW.04		Pemantauan/Monitoring					
			PW.04.00	Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk di dalamnya pemantauan terhadap kerugian negara	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
			PW.04.01	Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal termasuk di dalamnya pemantauan terhadap kerugian negara			Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PW.04.02	Pengaduan Masyarakat	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Rahasia	Pimpinan Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Inspektorat
		PW.05		Pengawasan Lainnya					
			PW.05.00	Pedoman Pengawasan Internal	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan pedoman terkait kegiatan pengawasan sampai dengan penetapan, bimbingan teknis, maupun sosialisasinya	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.01	Pembinaan Komitmen Anti Korupsi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan komitmen anti korupsi antara lain meliputi, pencanangan/penguatan Zona Integritas (ZI), program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi anti korupsi, kampanye anti korupsi, penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*) penetapan pejabat anti korupsi dan sebagainya			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.02	*Whistleblowing System*	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, penerapan serta penguatan *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.03	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.04	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.05	Pengelolaan Gratifikasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta pelaporan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PW.05.06	Forum Pengawasan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi	Terbatas	Pejabat Administrasi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.07	SP4N LAPOR	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.08	Manajemen Risiko	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan manajemen risiko Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mulai dari penyusunan matriks manajemen risiko hingga monitoring dan evaluasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.09	Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pemberian Keterangan Ahli, dan kegiatan lainnya terkait koordinasi dengan aparat hukum			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.10	Kapabilitas APIP (*Internal Audit Capability Model* - IACM)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek berupa peran dan layanan audit intern, pengelolaan SDM, praktik profesional, manajemen kinerja dan akuntabilitas, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
			PW.05.11	Peran Konsultansi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan konsultansi/pendampingan/asistensi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Inspektorat
14	DI			DATA DAN SISTEM INFORMASI					
		DI.00		Pengelolaan Data					
			DI.00.00	Dokumen Pengelolaan Data	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan naskah dinas pengumpulan, permintaan, pengolahan, dan penyajian data	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		DI.01		Sistem Informasi					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			DI.01.00	Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SI)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi meliputi penyusunan dan penetapan rencana strategis (*master plan*) pembangunan manajemen sistem informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.01.01	Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen arsitektur dan implementasi aplikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan *website*			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.01.02	Perekaman dan Pemutakhiran Data	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.01.03	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan migrasi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.01.04	Dokumen *Hosting*	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dokumen *hosting*			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.01.05	Layanan *Back Up* Data Digital	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan layanan *back up data digital*			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		DI.02		Pengembangan Sistem Informasi					
			DI.02.00	Pembangunan Sistem Informasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan Daftar Flow Diagram (DFD), proses bisnis, dan kode sumber aplikasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.02.01	Pengembangan Sistem Informasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan bisnis proses *re-engeneering*, kode sumber aplikasi, dan rancangan aplikasi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			DI.02.02	Keamanan Informasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keamanan informasi meliputi penyelenggaraan penyidikan dan penindakan pelanggaran, Berita Acara penyidikan keamanan informasi, dan pengelolaan keamanan informasi	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.02.03	Pemberian Fasilitasi dan Layanan Sistem Informasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas dan layanan sistem informasi			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
			DI.02.04	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Informasi	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan			Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik
		DI.03		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE)	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Biasa/Terbuka	Publik	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

NO	KODE KLASIFIKASI			URAIAN	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PRIMER	SEKUNDER	TERSIER						
1	PA			PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG					
		PA.00		Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria					
			PA.00.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
			PA.00.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
			PA.00.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria
		PA.01		Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I					
			PA.01.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PA.01.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I
			PA.01.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I
		PA.02		Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II					
			PA.02.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
			PA.02.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
			PA.02.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II
		PA.03		Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi					
			PA.03.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
			PA.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PA.03.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
		PA.04		Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal					
			PA.04.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
			PA.04.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
			PA.04.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan/tindak lanjut hasil rekomendasi dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal
2	KV			KONEKTIVITAS					
		KV.00		Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah					
			KV.00.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KV.00.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah
			KV.00.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan konektivitas antar wilayah			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah
		KV.01		Konektivitas Darat dan Perkeretaapian					
			KV.01.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian
			KV.01.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian
			KV.01.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas darat dan perkeretaapian			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian
		KV.02		Konektivitas Maritim dan Udara					
			KV.02.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas maritim dan udara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara
			KV.02.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas maritim dan udara			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			KV.02.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas maritim dan udara	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara
		KV.03		Konektivitas Berkelanjutan					
			KV.03.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas berkelanjutan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan
			KV.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas berkelanjutan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan
			KV.03.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas berkelanjutan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Konektivitas Berkelanjutan
		KV.04		Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas					
			KV.04.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas
			KV.04.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas
			KV.04.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana pendukung konektivitas			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Pendukung Konektivitas
3	ID			INFRASTRUKTUR DASAR					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		ID.00		Infrastruktur Dasar Strategis					
			ID.00.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar strategis	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis
			ID.00.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar strategis			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis
			ID.00.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang infrastruktur dasar strategis			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Strategis
		ID.01		Infrastruktur Umum dan Sosial					
			ID.01.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur umum dan sosial	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial
			ID.01.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur umum dan sosial			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial
			ID.01.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang infrastruktur umum dan sosial			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Umum dan Sosial
		ID.02		Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan					
			ID.02.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur sumber daya air dan pangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			ID.02.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur sumber daya air dan pangan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan
			ID.02.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur sumber daya air dan pangan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan
		ID.03		Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi					
			ID.03.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur energi dan telekomunikasi	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi
			ID.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur energi dan telekomunikasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi
			ID.03.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur energi dan telekomunikasi			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi
		ID.04		Infrastruktur Ekonomi dan Industri					
			ID.04.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur ekonomi dan industri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri
			ID.04.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur ekonomi dan industri			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			ID.04.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur ekonomi dan industri	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri
4	PP			PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN					
		PP.00		Peningkatan Akses Perumahan					
			PP.00.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan
			PP.00.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses perumahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan
			PP.00.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses perumahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan
		PP.01		Penyediaan Lahan Perumahan					
			PP.01.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyediaan lahan perumahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan
			PP.01.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyediaan lahan perumahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan
			PP.01.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang penyediaan lahan perumahan			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		PP.02		Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman					
			PP.02.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman	Terbatas	inan Tinggi Pra	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman
			PP.02.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman
			PP.02.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan penataan kawasan permukiman			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman
		PP.03		Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
			PP.03.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PP.03.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PP.03.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PP.04		Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal					
			PP.04.00	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			PP.04.01	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
			PP.04.02	Pemantauan/Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pelaksanaan kebijakan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan transmigrasi dan daerah tertinggal			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Asisten Deputi Pembangunan Perumahan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal
5	RK			REKOMENDASI KEAHLIAN					
		RK.00		Rekomendasi Keahlian Isu-Isu Strategis					
			RK.00.00	Perumusan Rekomendasi Keahlian Bidang Pembangunan Daerah	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi di bidang Pembangunan Daerah	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
			RK.00.01	Perumusan Rekomendasi Keahlian Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi di bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital
6	PK			PENUGASAN KHUSUS					
		PK.00		Penugasan khusus	Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait penugasan khusus di luar tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Terbatas	Pimpinan Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Pejabat yang mendapatkan penugasan khusus

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO